

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang dalam suatu negara perlu adanya anggaran sebagai penyokong utama. Komponen utama anggaran tersebut dihitung dari penerimaan negara yang salah satunya dihasilkan dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Perkembangan di bidang perpajakan didukung oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Sejak tahun 1983 reformasi pajak sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan telah memberikan perubahan yang konstruktif bagi perpajakan Indonesia sehingga mampu menunjukkan fungsinya sebagai salah satu komponen penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).² Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan sampai saat ini. Awal mula pembangunan pada masa Orde Baru, pada masa ini merupakan langkah awal melaksanakan pembangunan dalam meratakan perekonomian sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan pembangunan nasional, diperlukan suatu dana yang sangat besar agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Sumber penerimaan anggaran dana berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri berasal dari penerimaan sektor pajak, iuran, retribusi, bea dan cukai, sumbangan, laba dari Badan Usaha

² Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia" dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id>, diakses 12 Oktober 2023

Milik Negera (BUMN) dan sumber lainnya. Untuk penerimaan luar negeri bisa berasal dari pinjaman luar negeri. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2021 sampai 2023 penerimaan pendapatan negara dari sumber perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor penerimaan perpajakan, sektor penerimaan bukan pajak, dan sektor hibah merupakan salah satu sumber penerimaan anggaran Indonesia.³ Kontribusi paling besar terhadap penerimaan negara saat ini adalah sektor penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.⁴

Penerimaan pajak berperan penting dalam sumber penerimaan dan pemerintah juga bergantung dari sektor tersebut untuk menstabilkan perekonomian. Dilihat dari sisi *tax ratio* Indonesia termasuk jajaran *tax ratio* terendah dibanding negara tetangga. Suatu instrumen untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan cara membandingkan jumlah pajak yang didapatkan dengan jumlah pendapatan domestik bruto merupakan pengertian dari *tax ratio*.⁵ Sehingga jika *tax ratio* semakin besar maka penerimaan pajak dalam suatu negara juga akan semakin besar. *Tax ratio* Indonesia tercatat sebagai *tax ratio* terendah ketiga se Asia dan Pasifik yang disurvei oleh oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh

³ Badan Pusat Statistik. Diakses 12 Oktober 2023

⁴ Judisseno, *Pajak dan strategi Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal. 57

⁵ Anggraeni Dwijayanti, "Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)" dalam <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>, diakses 14 Oktober 2023

OECD *tax ratio* Laos dan Bhutan lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang tercatat mencapai 11,6%.⁶

Dibawah ini merupakan daftar penerimaan pajak dalam negeri di Indonesia yang menjadi salah satu sumber penerimaan utama untuk Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN)

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Pajak Dalam Negeri (Satuan Milyar Rupiah)

Pajak Dalam Negeri	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	749.977	772.265	594.033	696.676	895.101
Pajak Pertambahan Nilai	537.267	531.577	450.328	551.900	680.741
Pajak Bumi dan Bangunan	19.444	21.145	20.953	18.924	20.903
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0
Cukai	159.588	172.421	176.309	195.517	224.200
Pajak Lainnya	6.629	7.677	6.790	11.126	11.381
Jumlah	1.472.905	1.505.085	1.248.413	1.474.143	1.832.326

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023⁷

Pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan negara berasal dari pajak dalam negeri yang salah satunya terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satu penerimaan pajak yaitu bersumber dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan kepada konsumen secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN (Pajak Pertambahan

⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Diakses tanggal 12 Oktober 2023.

⁷ Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 12 Oktober 2023

Nilai) dan PPNBM.⁸ Penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivitas transaksi keuangan berupa penjualan barang dan jasa yang awalnya hanya disektor offline bergeser ke sektor online juga, hal ini menyebabkan perubahan dari sisi pendapatan dan pajak yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan negara dari kegiatan tersebut adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Perdagangan di Surabaya ini merupakan

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, sehingga PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ini bisa diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu pada barang atau jasa. Salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.⁹ Berdasarkan fenomena itu dapat diasumsikan bahwa penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara sehingga perlu adanya faktor pendukung baik itu dari faktor eksternal ataupun internal agar dapat menjamin ketersediaan sumber penerimaan yang tujuannya kepada kegiatan perekonomian negara itu sendiri.

Perekonomian negara dipengaruhi oleh faktor eksternal contohnya saat menurunnya stabilitas variabel ekonomi makro yang bisa berdampak buruk bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Bangkrutnya industri bisa menurunkan kapasitas produksi pada industri hal ini bisa menyebabkan kenaikan jumlah

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

⁹ Waluyo dan Ilyas, B. Wirawan, "*Perpajakan Indonesia*", (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 110

pengangguran. Apabila stabilitas ekonomi terus menerus mengalami penurunan maka hal ini akan menyebabkan daya beli masyarakat juga akan ikut turun, sehingga penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga akan berdampak mengalami penurunan. Komponen variabel ekonomi makro diantaranya yaitu tingkat inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi *e-commerce*.

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana tingkat harga barang ataupun jasa naik secara terus-menerus, kondisi yang tidak kondusif dapat menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada suatu negara. Hal ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian, yaitu tingkat pendapatan masyarakat, output, dan efisiensi¹⁰. Pengaruh dari inflasi berperan penting bagi perekonomian di Indonesia karena dengan terjadinya inflasi bisa mempengaruhi seluruh variabel ekonomi, misalnya pada pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor impor, tingkat suku bunga, investasi maupun pada penerimaan pajak. Tingkat inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada suatu negara¹¹. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Wiryawan dan Suhartono¹² yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi Berpengaruh Signifikan terhadap transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada penelitiannya.

Variabel ekonomi makro yang kedua yaitu nilai tukar (*exchange rate*) atau biasa disebut dengan kurs valuta asing adalah jumlah mata uang domestik atau

¹⁰ Gumilang, R. C., & Hidayat, R. R, “Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013” dalam <https://journal.unesa.ac.id>, diakses 25 September 2023

¹¹ Wahyudi. “*Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 35

¹² Ilyas Wiryawan dan Rudy Suhartono, “*Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), hal. 27

rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing¹³. Ketika nilai tukar ini melemah atau depresiasi maka harga barang akan mengalami peningkatan, dan kenaikan dari harga barang tersebut dapat mempengaruhi konsumsi pada masyarakat. Keadaan itu secara langsung akan memberi dampak pada penurunan penerimaan pajak konsumsi. Banyak faktor yang membuat kondisi nilai rupiah terhadap dolar yang cenderung tidak stabil.

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah tingkat transaksi pada *e-commerce*, tingkat transaksi pada *e-commerce* ini merupakan bisnis menggunakan jaringan komputer dengan internet sebagai perantara antara konsumen, manufaktur, dan *services providers*. Penggunaan internet ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat menunjang dari kegiatan seluruh komersial. Hal ini diakibatkan dari internet yang sifatnya sangat global dan seluruh dunia juga dapat mengaksesnya dengan waktu yang tidak terbatas selama 24 jam setiap hari. Seluruh informasi di dunia ini bisa diakses kapanpun, dimanapun dan pada waktu apapun. Sehingga dengan kecanggihan internet ini para wirausahawan dan *provider* dari internet memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan transaksi di dunia maya yang disebut juga berbelanja di internet istilah ini dikenal dengan *e-commerce*.

Indonesia sekarang sedang mengalami keadaan perekonomian yang fluktuasi (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI). Menurunnya stabilitas pada variabel ekonomi makro dikarenakan banyak hal, misalnya seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar yang melemah, tingkat transaksi pada *e-commerce* dan

¹³ Murni, *Ekonomika Makro*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 34

lain sebagainya.¹⁴ Namun perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu mengenai tingkat inflasi yang cukup tinggi dikarenakan komoditas harga yang cenderung fluktuasi misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak dan naiknya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Peningkatan dari bahan bakar minyak ini akan berdampak kepada naiknya harga barang kebutuhan masyarakat sehingga hal ini juga akan bersinggungan oleh kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang maupun jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianingtyas¹⁵ dengan judul pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_1), inflasi (X_2), dan jumlah PKP (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Y). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel tingkat transaksi pada *e-commerce* sebagai (X_3) dan pada Objek penelitian yang dilaksanakan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Renata, Hidayat dan Kaniskha¹⁶ didalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) studi kasus pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Berdasarkan hasil uji

¹⁴ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR RI, "Peran Positif Defisit Anggaran Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI" dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen>, diakses 14 Oktober 2023

¹⁵ Laily Dwi Yulianingtyas, "Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai)", dalam <https://jurnal.ub.ac.id>, diakses 20 September 2023

¹⁶ Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha, "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai", <https://jurnal.ub.ac.id>, diakses 20 September 2023

peneliti, inflasi (X_1) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan PPN, Jumlah PKP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan PPN. perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel tingkat transaksi pada *e-commerce* sebagai (X_3).

Nabilah dan Angraini¹⁷, penelitian ini bertujuan untuk menguji transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak.. Hasil dari penelitian ini yaitu transaksi *e-commerce* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak. Adapun persamaan dari penelitian ini yakni, pada variable tingkat transaksi pada *e-commerce* (X_1) dan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel inflasi (X_1) dan nilai tukar rupiah atas dolar (X_2). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabel inflasi (X_1) dan nilai tukar rupiah atas dolar (X_2).

Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak mencapai target. Variabel tingkat inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* yang mempunyai kertekaitan erat atas penyebab penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Ketiga variabel yang telah disebutkan tersebut merupakan data yang sifatnya fluktuatif. Secara langsung ataupun tidak langsung ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi penerimaan

¹⁷ Qotrunnada Geovany Nabilah dan Dila Angraini, "Pengaruh Transaksi *E-commerce*, Pegawai Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua", dalam <http://openjournal.unpam.ac.id>, diakses 7 Mei 2024

atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Nilai tukar rupiah ini bisa mempengaruhi harga produk dalam negeri dan terutama harga barang produk impor ataupun jual beli pada perdagangan internasional, hal ini nantinya juga akan berdampak pada tingginya tingkat transaksi masyarakat pada *e-commerce* itu sendiri dan naiknya inflasi.¹⁸ Penelitian ini dirasa penting karena dapat mengetahui peran penting mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai sumber penerimaan pajak, maka dari itu peneliti tertarik dan ingin mengetahui apakah ketiga variabel diatas dapat mempengaruhi penerimaan atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Objek dari penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I. Penulis melakukan penelitian pada wilayah tersebut karena wilayah tersebut terdapat banyak industri-industri besar yang menyebabkan banyak penduduk asli maupun pendatang tinggal didaerah tersebut untuk melakukan kegiatan jual beli sehingga sedikit banyak wilayah ini dapat dijadikan sebagai penelitian penulis. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam skripsi dengan judul: Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS dan Tingkat Transaksi *e-commerce* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I).

B. Identifikasi Masalah

¹⁸ Friska Darnawaty Sitorus, "Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Nilai Tukar Rupiah" dalam <https://jurnal.unimed.ac.id>, diakses 25 September 2023

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya Inflasi pada suatu Negara apakah bisa mempengaruhi besarnya penerimaan Negara dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan salah satu penerimaan terbesar Negara.
2. Dalam menjaga kestabilan nilai tukar Mata uang pemerintah harus ikut campur dengan cara melakukan kebijakan fiskal yang akan berdampak pada nilai tukar, perubahan nilai tukar ini apakah akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Negara dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Memasuki Perkembangan zaman terdapat perubahan paradig dimana kecenderungan belanja masyarakat yang semula melalui pembelanjaan secara langsung, bergeser menjadi Pembelian secara Online. Hal ini mempengaruhi Tingkat Transaksi *e-commerce*, apakah peningkatan Transaksi ini juga akan berdampak terhadap Penerimaan Negara melalui PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* secara simultan Berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

2. Apakah inflasi secara parsial Berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Apakah nilai tukar rupiah atas dolar AS secara parsial Berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
4. Apakah tingkat transaksi pada *e-commerce* secara parsial Berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
2. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
3. Untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah atas dolar AS terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
4. Untuk menguji pengaruh tingkat transaksi pada *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Memberikan manfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan perpajakan dan memberikan tambahan ide pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis, Prodi Akuntansi Syariah Konsentrasi Perpajakan.
- b) Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti

Untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan apa yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan dengan kenyataan empiris di lapangan.

- b) Bagi instansi terkait

Manfaat bagi instansi diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau tambahan ide pemikiran bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dalam meningkatkan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana fokus untuk penelitian ini terkait fenomena-fenomena dan dianalisis secara

kuantitatif. Data dalam fenomena-fenomena yang akan dianalisis berada di web resmi masing-masing variabel yang digunakan, misalnya web Bank Indonesia yang akan digunakan untuk melihat kurs nilai tukar rupiah, web Badan Pusat Statistika yang akan digunakan untuk melihat data inflasi maupun tingkat transaksi pada *e-commerce* dimana wilayahnya di Surabaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas, yaitu Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS dan Tingkat Transaksi Pada *e-commerce* Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan kepada hasil dari penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur I. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, data sekunder ini datanya tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder ini fungsinya untuk melengkapi ataupun mendukung data pada penelitian penulis.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu pada variabel yang digunakan pada penelitian ini masih sangat terbatas, dalam penelitian belum dijelaskan secara lengkap faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Data sekunder yang dikumpulkan masih terbatas pada wilayahnya yaitu di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Penerimaan atas Pajak Pertambahan Nilai

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan jumlah uang yang didapatkan oleh negara yang diperoleh atas transaksi jual beli BKP ataupun JKP yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu WP pribadi atau badan. Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 11% dengan DPP yang merupakan nilai transaksi atas BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak).¹⁹

b. Inflasi

Inflasi adalah dimana kenaikan harga-harga barang pokok terjadi secara terus menerus pada suatu perekonomian, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK) dan pada indeks harga produsen (IHP).²⁰

c. Nilai Tukar Rupiah atas Dolar Amerika Serikat

Nilai tukar rupiah atas dolar AS merupakan suatu pengukuran atau harga mata uang rupiah yang diukur dengan dolar Amerika (USD). Nilai tukar rupiah ini dapat dilihat dalam berbagai sumber, misalnya pada web Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Nilai tukar rupiah ini dapat

¹⁹ Waluyo dan Ilyas, B. Wirawan, “*Perpajakan Indonesia*”,.....Hal. 97

²⁰ Hanifah Nurul, “Indeks Harga Konsumen dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi” dalam <https://ejournal.unis.ac.id>, diakses 15 Oktober 2023

berubah ubah setiap saat sesuai dengan perubahan atau pergerakan pada pasar.²¹

d. Transaksi pada *e-commerce*

Transaksi pada *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang melibatkan penjual dan pembeli atau dengan pihak lain yang memiliki perjanjian untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan atas hak barang atau jasa. Transaksi dengan menggunakan *e-commerce* ini menggunakan media digital tanpa memerlukan pertemuan langsung antara pihak pembeli dan penjual.²²

2. Definisi Operasional

Dari judul penelitian pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* peneliti akan meneliti mengenai apakah inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga dapat memberikan sumber pendapatan bagi negara.

H. Sistematika Skripsi

²¹ Samsul Arifin dan Shany Mayasya, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat” dalam <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>, diakses 15 Oktober 2023

²² Dedi Riswandi, “Transaksi On-Line (*E-commerce*): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam <https://unu-ntb.e-journal.id>, diakses 24 Oktober 2023

Penulis menguraikan secara deskriptif mengenai sistematika pembahasan supaya mempermudah pembahasan secara terperinci dan terarah, sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan skripsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari enam bab pembahasan, antara lain

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi mengenai (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori: Bab ini berisi mengenai teori-teori dan referensi-referensi yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang terdahulu sebagai landasan terkait pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah atas dolar AS dan tingkat transaksi pada *e-commerce* terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel penelitian, (c) sumber data,

variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bab ini memuat tentang (a) hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh dan data yang telah diolah dengan menggunakan alat bantu, (b) temuan penelitian

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian: Bab ini berorientasi untuk memaparkan hasil dari permasalahan penelitian atau menunjukkan tujuan dari penelitian yang telah disepakati, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Memodifikasi teori yang ada dan menjelaskan implikasi dari hasil penelitian tersebut.

BAB VI Penutup: Bab ini menjelaskan mengenai (a) kesimpulan, (b) saran bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini menjelaskan mengenai daftar rujukan yang digunakan peneliti, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.